

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DI SUKOLILO PATI

Falasifatul Falah

Zamroni

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Email: falasifatul.falah@gmail.com; zamroni.psi@gmail.com

Abstract

Corruption has become a serious problem in Indonesia because it spreads across all sectors and sectors in a widespread, systematic, and well organized society. Corrupt behavior as if entrusted in all levels of society, from the top to the grassroots level. Indonesian people need to learn about the anti-corruption values of Sedulur Sikep (Samin) society. This study aims to determine the extent to which Sedulur Sikep people know about the phenomenon of corruption that occurred in Indonesia, the anti-corruption values that underlie their way of life, how their attitude toward corruption, and what they do when facing corrupt behaviors that entrapment in Indonesia. Honesty and independence are the most important foundation for Sedulur Sikep society so that the appeal of these values is consistent with their daily attitude of life.

Key words: corruption, anti-corruption, honesty; Sedulur Sikep community, culture

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia karena menyebar ke seluruh bidang dan sektor dalam masyarakat luas, berlangsung sistematis, dan terorganisasi dengan baik. Transparency International menyatakan bahwa Indonesia, dengan skor 36 dari 100, saat ini masih berada di peringkat 88 dari 167 negara dalam upaya pemberantasan korupsi (Transparency International, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja keras untuk memberantas korupsi di Indonesia, terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani. Total perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2004-2015 adalah 714 penyelidikan perkara, 437 penyidikan perkara, 353 penuntutan perkara, 298 inkracht perkara, dan 315 eksekusi perkara. Namun jumlah pengaduan masyarakat tentang adanya aktivitas korupsi juga tidak berkurang. Hanya dalam kurun waktu tujuh bulan sejak awal tahun hingga 31 Juli 2015, KPK sudah menerima 3.378 laporan pengaduan masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, bahkan para investor asing yang bermaksud menanamkan modal pun mengeluhkan buruknya perilaku korupsi di negeri ini (Crossin, Brown, & Norris, 2013).

Pada masa Orde Baru korupsi merupakan aktivitas yang rutin dan mengakar dalam kegiatan sehari-hari dan struktur administrasi pegawai negeri Indonesia. Ada rasionalisasi ideologi yang mendukung korupsi, termasuk penolakan atas tanggung jawab, beban sosial serta keinginan untuk tampak loyalitas terhadap atas. Puncak dari rasionalisasi ini adalah penjelasan mengenai rendahnya gaji pegawai negeri sipil, akuntabilitas yang buruk, serta kepemimpinan yang korup di tingkat pemerintahan senior (Budiman, Roan, & Callan, 2013).

Perilaku korup seolah membudaya di semua lapisan masyarakat, dari level teratas hingga akar rumput (Sanusi, 2009). Seorang eksekutif senior yang berasal dari Eropa dan bekerja di

Jakarta, misalnya, mengatakan bahwa permainan suap sudah menjadi cara hidup dalam dunia bisnis di Indonesia (Crossin, Brown, & Norris, 2013).

Perkembangan korupsi pada saat ini bukan saja terjadi di pusat saja, karena otonomi daerah ikut andil di dalam “pendistribusian” korupsi hingga ke daerah-daerah. Ini terlihat dari hasil penelitian *Governance Assessment Survey* (2006) yang dilakukan oleh Kemitraan dan PSSK UGM di 10 Propinsi dan Kabupaten, memperlihatkan adanya praktik korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Hal ini membuat pelayanan pada publik tidak maksimal karena perilaku birokrasinya korup (Setyawan, 2012).

Faktor budaya dianggap sebagai salah satu aspek yang mendorong individu melakukan korupsi, mengingat korupsi dianggap sebagai bagian dari ‘kebiasaan’ di Indonesia (Sujatmiko, 2002). Sejarah mencatat bahwa tindakan korupsi telah dilakukan orang Indonesia sejak sebelum republik ini lahir. Salah satu surat yang ditulis Kartini pada masa peralihan antara abad ke-19 dan abad ke-20 mengungkapkan bahwa pada saat itu itu banyak pegawai pribumi melakukan korupsi yang berbentuk penerimaan gratifikasi dari masyarakat umum (Kartini, 1985).

Kronisnya masalah ini menyebabkan masyarakat memiliki sikap apatis terhadap semua jenis korupsi, baik korupsi konvensional (mencuri uang rakyat atau korupsi non-konvensional (perlahan-lahan dalam melayani, melarikan diri dari tanggung jawab, sikap egois dan mau menang sendiri, dan sebagainya), yang menghasilkan pelayanan publik yang dilakukan tidak maksimal. Masyarakat menunjukkan apatisisme dalam menyikapi usaha pemberantasan korupsi. Ada “kemarahan” di tengah masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, tetapi tidak tahu bagaimana menghadapinya. Masyarakat sesungguhnya berharap dari aparat penegak hukum, namun faktanya aparat penegak hukum justru menjadi bagian dari lingkaran benang kusut korupsi. Penyebab apatisisme masyarakat juga disebabkan persepsi masyarakat tentang pemberantasan korupsi yang sulit diatasi. Hal ini terjadi karena banyaknya hambatan dalam pemberantasan korupsi (Setyawan, 2012).

Salah satu penyebab sulitnya gerakan memerangi korupsi di Indonesia adalah dualisme yang menjangkiti masyarakat dalam bersikap menghadapinya. Di satu sisi korupsi dihujat, di sisi lain perilaku korup dianggap sebagai bagian dari budaya yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku keseharian masyarakat (Falah, 2012).

Masyarakat Indonesia disarankan agar belajar tentang nilai-nilai anti-korupsi dari masyarakat Sedulur Sikep yang dikenal juga sebagai “orang Samin”. Masyarakat Sedulur Sikep dikenal dengan kejernihan hidup yang mengacu pada Sang Maha Pencipta, pada alam semesta, serta pada sesama manusia.

Saminisme, ajaran hidup masyarakat Sedulur Sikep, selalu mengedepankan kejujuran dan kesahajaan. Samin Surosentiko di dalam karyanya, “Serat Jamus Kalimasada”, menyatakan, “*Aja dengki srei, tukar padu, dahpen kemeren, aja kutil jumput, mbedog colong*” (Hanif, 2012).

Kejujuran merupakan dasar terpenting yang konsisten dengan sikap hidup keseharian masyarakat Sedulur Sikep, dan dianggap sebagai senjata yang ampuh untuk melawan virus perilaku korupsi yang menjangkiti sebagian masyarakat Indonesia.

TELAAH PUSTAKA

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corrumpero* yang berarti patah, putus, atau rusak. Korupsi adalah ketika sesuatu rusak dari dalam. Integritas obyek korupsi terancam oleh kerusakan internal. Korupsi memiliki makna yang luas, menggambarkan segala macam bentuk

kerusakan moral, dan secara lebih spesifik menggambarkan kerusakan dalam konteks politik (Teachout, 2009).

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyiratkan adanya perluasan dari bentuk korupsi, antara lain dengan menyebutkan tentang korupsi waktu yang berarti “penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi”, sedangkan kata kerja “mengorupsi” disinonimkan dengan “menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pranala permanen).

Definisi “korupsi” (*corruption*) menurut Kamus Oxford adalah “*dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery*” yang berarti ketidakjujuran atau kecurangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, khususnya yang melibatkan tindak penyuapan. Kamus ini juga menyebutkan bahwa korupsi juga bisa berarti “*the action or effect of making someone or something morally depraved*” yang artinya suatu tindakan atau akibat yang menyebabkan kerusakan moral pada seseorang atau sesuatu hal. Kamus Oxford lebih lanjut mendefinisikan kata sifat “korup” (*corrupt*) sebagai “*having or showing a willingness to act dishonestly in return for money or personal gain*” yang artinya kesengajaan untuk bertindak tidak jujur dalam hal pengembalian uang atau mengambil keuntungan pribadi, serta sebagai kerusakan moral (Oxford Dictionaries, pranala permanen).

Korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang berlaku di Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya sebagai pegawai negara atau pejabat publik, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang terlibat dalam perbuatan korupsi tersebut, serta berdampak menimbulkan kerugian pada masyarakat atau negara (Sina, 2008).

Korupsi, dalam istilah yang digunakan secara umum, didefinisikan oleh Anechiarico–Jacobs sebagai penyalahgunaan seseorang atau sekelompok orang dari pihak berwenang, untuk mendapatkan beberapa keuntungan material (Andrei, Teodorescu, Bourbonnai, & B.Oancea, 2009).

Korupsi didefinisikan oleh Rabl dan Ku’hlmann (Rabl, 2011) sebagai berikut: (1) Korupsi adalah perilaku menyimpang yang memanifestasikan diri dalam penyalahgunaan suatu fungsi yang diamanatkan oleh orang lain atau institusi. (2) Penyalahgunaan fungsi ini terjadi atas inisiatif seseorang atau orang lain dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi pihak ketiga. (3) Korupsi terjadi sebagai pertukaran keuntungan dan imbalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan yang bersifat korup. (4) Korupsi menghasilkan kerusakan atau kerugian politik, masyarakat, atau ekonomi. (5) Perbuatan korup terjaga kerahasiaannya di dalam suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan bersahabat (Rabl, 2011).

Merujuk pada pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu korupsi di kalangan pejabat, korupsi dalam departemen, korupsi di kalangan BUMN, dan korupsi bantuan luar negeri (Sanusi, 2009).

Cameron dkk. meyakini bahwa sikap terhadap korupsi dibentuk oleh sistem sosial, politik, hukum, dan ekonomi di Negara di mana individu hidup, dan pengalaman kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan korupsi (Cameron, Chaudhuri, Erkal, & Gangadharan, 2005).

Penelitian menghasilkan bukti bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat pada sikap individu terhadap korupsi. Individu yang tinggal di daerah di mana orang rata-rata relatif kurang menolak untuk korupsi cenderung juga untuk menjadi lebih toleransi terhadap

korupsi. Temuan ini memvalidasi prediksi model teoritis yang menggarisbawahi pentingnya dampak sosial (Gatti, Paternostro, & Rigolini, 2003).

Masyarakat Sedulur Sikep

Komunitas Sedulur Sikep (Samin) merupakan bagian dari masyarakat yang menganut dan mempertahankan ajaran Samin Surosentiko. Orang-orang dalam komunitas ini mempunyai tata cara, adat istiadat, bahasa serta norma-norma yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Komunitas Samin memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka, antara lain terlihat dari pakaian dan bahasa yang digunakan sehari-hari, yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Identitas tersebut menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka sesuai dengan ajaran *Saminitisme* yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu terutama generasi tua. Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Samin Surosentiko sebagai pandangan hidup yang sangat berguna. Sikap dan perbuatan orang-orang Samin selalu diikuti bukti-bukti nyata dan konsekuen sesuai dengan ajaran yang diterima (Lestari, 2013).

Gerakan Samin pada awalnya merupakan gerakan petani yang menolak mengikuti perintah kolonial. Samin Surontika merupakan tokoh dari gerakan ini, yang kemudian melebar tak hanya di Blora, tetapi juga di beberapa kawasan lain. Samin Surontika, atau Surosentika, lahir di sekitar Blora. Nama kecilnya adalah Raden Kohar, beliau adalah seorang keturunan priyayi, yang memiliki beberapa lahan garapan yang cukup luas. Namun, memilih untuk menjadi petani dan menggerakkan perlawanan dari warga desa untuk melawan kekuasaan kolonial (Aziz, 2012).

Merujuk pada Benda and Castles (Aziz, 2012), pada tahun 1890, Samin mulai menyebarkan pengaruhnya di sekitar Bojonegoro dan Blora. Tahun 1905, Samin mulai menarik warga untuk mengikuti prinsipnya, menolak menyumbang untuk lumbung desa yang dikelola pemerintah kolonial, menolak menggembala ternak bersama-sama, dan menolak membayar pajak. Pada bulan Januari 1903, resident Rembang melaporkan bahwa ada sekitar 772 pengikut Samin di 34 desa di perbatasan Blora Selatan dan Bojonegoro. Surohidin dan Karsijah, menantu Samin, aktif dalam melakukan pengajaran bagi warga dan petani di sekitar tempat tinggalnya. Dari pola inilah, pengikut Samin menyebar di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Aziz, 2012).

Pengikut Samin yang tersebar di beberapa kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, umumnya petani yang hidup dari menggarap lahan sawah dan menggembala ternak. Kebijakan pajak oleh pemerintah kolonial dirasakan memberi beban berat, kemudian mereka berpaling kepada gerakan pembebasan rakyat dari kaum petani. Menurut Widiyanto (Aziz, 2012), penyebaran pengikut Samin diikuti dengan penyebaran pengaruh dan ideologi, tidak hanya penolakan terhadap kewajiban membayar pajak, tetapi prinsip dalam mengelola sumber daya alam: "*lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe*" yang berarti bahwa tanah, air dan kayu adalah milik bersama. Pengikut Samin juga memiliki logika dan cara pandang dunia yang berbeda dengan pandangan masyarakat umumnya, khususnya ketika berkaitan dengan represi penguasa (Aziz, 2012).

Memori atas penjajahan memberi warisan etos perjuangan keseharian dalam diri kaum Samin. Perjumpaan dengan kolonialisme pada awal abad 20 berdampak pahatan memori pada watak, etos, dan *world-view* (pandangan dunia) kaum Samin ketika berhadapan dengan negara, perusahaan dan komunitas di luar dirinya. Ada pembelokan 'logika bahasa', sebagai alat untuk menghindari represi (Aziz, 2012).

Identitas orang Samin memang sangat erat kaitannya dengan bahasa yang mereka pergunakan. Masyarakat suku Jawa yang lain mengenal orang Samin sebagai pengguna bahasa Jawa yang sederhana atau "bahasa Jawa lugu". Penampilan orang Samin dengan orang-orang di

sekitarnya baru terlihat ketika mereka berbicara, apakah mereka menggunakan bahasa Samin atau tidak (Mardikantoro, 2012).

Takashi Shiraishi (Aziz, 2012) mengungkapkan bahwa *wong Sikep* memiliki ciri-ciri seperti berikut: *Pertama*, konsep utama agama Adam sebagai hidup (*urip*), yang merupakan inti dari bentuk kehidupan berupa *suksma/nyawa*. Hidup (*urip*) punya banyak makna, namun semua bentuk dibagi menjadi dua: *wong* (orang) dan *sandang pangan* (pakaian dan makanan). *Kedua*, semua aktivitas manusia dimaksudkan untuk dua hal: (1) *tatanewong*, mengelola hidup dengan melakukan sikep rabi (*sexual intercourse*). (2) *toto nggaoto*, memproduksi sandang pangan dengan mengelola lahan. Ringkasnya, lelaki *ngitjir* (menanam) dan perempuan *nganakake* (melahirkan). *Ketiga*, *wong*, ada dua macam: *wong Jowo*, yang jujur, menepati janji, dan tidak melakukan kejahatan. Sedangkan *wong Jawal*, adalah gila dan jahat (Aziz, 2012).

Shiraishi (Aziz, 2012) menyatakan bahwa *wong Sikep* hidup dengan menghayati agama Adam dan menjadi *wong Jawa* dengan segala identitas moralnya. Dalam agama Adam, pengikut Samin menganggap bahwa Adam sebagai lorong menuju spiritualitas (*Agama iku gaman, gaman lanang, Adam pengucape*).Maksudnya adalah agama merupakan alat untuk menjalin hubungan dengan Yang Maha Mencipta (*Sing Nduwe Jagad*), dan juga perisai untuk melindungi diri. Menurut Widodo (Aziz, 2012), ajaran-ajaran Adam adalah ajaran moral kemanusiaan, yang diyakini pengikut Samin sebagai fondasi moral dan adat komunitasnya (Aziz, 2012).

Prinsip yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Sedulur Sikep adalah soal kejujuran dan ketulusan bergaul. Masyarakat Samin tidak berani melanggar pantangan yang diwariskan sejak ratusan tahun. Seperti larangan “*ora oleh ngrasani* (dilarang membicarakan orang lain), *ora oleh drengki sre* (tidak boleh dengki terhadap kesuksesan orang lain), *ora oleh panasten* (tidak boleh iri), *ora oleh dahwen* (tidak boleh sombong), *ora oleh petil jumput* (tidak boleh mengambil barang milik orang lain), *nemu wae ora keno* (bahkan memiliki barang temuan saja tidak boleh)” (Rosyid, 2013).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Sedulur Sikep mengetahui tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia, bagaimana sikap mereka terhadap korupsi, serta apa yang mereka lakukan menghadapi perilaku korup yang membudaya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif, yaitu suatu proses untuk memperoleh pemahaman berdasarkan metode investigasi khusus untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 1998)

Lebih khusus lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang bertujuan menggali esensi atau makna dari suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup narasumber atau subjek penelitian (Creswell, 1998).

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Sedulur Sikep yang tinggal di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan kriteria berusia dewasa dan mampu berkomunikasi. Subjek diperoleh melalui metode *snowball*. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak C, Ibu IC, dan Ibu Gi. Ada informan anggota masyarakat setempat yang bukan merupakan anggota Sedulur Sikep, yaitu Ibu N, yang turut membantu peneliti untuk melakukan *raport* atau pendekatan terhadap subjek utama, serta memberikan informasi tambahan.

Data dalam penelitian ini diambil pada bulan Juni 2015 di kediaman para subjek di Sukolilo, Pati, dengan metode pengambilan data wawancara mendalam (*indepth interview*), sesuai acuan metode pengambilan data yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan disain fenomenologi. Wawancara mendalam dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk

mengungkapkan makna psikologis suatu peristiwa sesuai persepsi subjek penelitian (Creswell, 1998). Wawancara dilakukan dengan bahasa daerah Jawa.

Kredibilitas dan keabsahan data penelitian ini dijaga melalui ketekunan pengamatan, pemeriksaan teman sejawat, metode triangulasi, kecukupan referensial, dan uraian rinci (Moleong, 2006).

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Sebelumnya data akan dieliminasi dengan melalui prosedur horisonalisasi untuk mendapatkan makna psikologis yang relevan dengan tujuan penelitian. Horisonalisasi sendiri merupakan prosedur untuk membatasi cakrawala invarian atau unit makna yang kemudian dikelompokkan sesuai tema-tema yang ditemukan (Leimeister, Knebel, & Krcmar, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Samin, yang sering disebut juga dengan nama “Sedulur Sikep”, pada dasarnya mengajarkan tentang makna kejujuran yang mendasari sikap anti-korupsi (Rosyid, 2013).

Kejujuran merupakan nilai utama yang senantiasa ditanamkan dalam pendidikan anak dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hati harus dijaga dari hawa nafsu serta rasa iri dan dengki.

Penanaman nilai-nilai yang disampaikan langsung oleh orang tua terhadap anak-anak merupakan hal yang penting bagi keluarga komunitas Sedulur Sikep. Hal ini diungkapkan oleh semua subjek dalam penelitian ini. Proses internalisasi nilai tersebut tidak dibatasi oleh jadwal waktu tetapi mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan penanaman nilai terhadap generasi yang lebih muda didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama dengan orang dewasa lain dalam komunitas, tetapi tanpa dibatasi waktu formal. Masyarakat Sikep umumnya lebih memilih mendidik sendiri anak-anak mereka daripada menyerahkan pendidikan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah formal. Mereka tidak khawatir tertinggal dalam hal esensi ilmu yang diajarkan pada anak, karena menganggap hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup sudah diajarkan orang tua, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dianggap sudah memadai untuk dijadikan pegangan dalam menjalani hidup.

Selain lebih memilih informalitas dalam pendidikan, subjek mengingatkan pentingnya contoh dan praktik nyata dalam metode penanaman nilai, sehingga nilai-nilai yang disampaikan tidak hanya terbatas melalui ucapan saja. Menurut subjek, orang tua atau orang dewasa yang mendidik anak harus mampu membuktikan bahwa dirinya sendiri juga konsisten atau setia pada nilai-nilai yang disampainya. Subjek menyiratkan pentingnya kepemimpinan dalam efektivitas penanaman nilai.

Para subjek juga menekankan pentingnya menggunakan metode atau cara yang baik ketika menyampaikan nilai-nilai yang baik. Orang tua yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak tidak dibatasi oleh gender. Ayah maupun ibu memiliki kewajiban yang sama menanamkan nilai pada anak.

Kewajiban menepati janji juga merupakan nilai yang dianggap penting dalam tata cara hidup masyarakat Sedulur Sikep. Demikian juga kepercayaan pada diri sendiri, termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Sikep menganggap setiap orang harus mampu mengawasi dirinya sendiri dengan hati nuraninya sendiri, karena orang lain belum tentu mampu memantau perilaku sesamanya.

Nilai lain yang ditekankan adalah kesederhanaan. Orang tua mengarahkan anak untuk hidup sederhana karena dianggap lebih mampu menjamin ketenteraman batin bila dibandingkan

dengan yang tergiur kemewahan. Hidup sederhana juga membuat orang lebih kuat untuk melawan godaan mengambil atau menikmati yang bukan haknya, misalnya bila menemukan benda-benda yang bukan miliknya maka akan dikembalikan pada pemiliknya atau dibiarkan saja bila pemiliknya tidak diketahui. Uniknyanya, masyarakat Sikep juga menganggap orang tidak berhak mengambil keuntungan materi dari orang lain dari berdagang, sehingga anggota Sedulur Sikep yang asli atau konvensional tidak akan mencari nafkah dengan cara berdagang.

Salah satu subjek bercerita tentang penolakan warga terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbaiki rumah. Bantuan ditolak karena merasa bantuan dari Pemerintah sebaiknya digunakan untuk fasilitas publik seperti jalan dan jembatan. Fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah juga ditolak karena mereka menganggap bahwa kondisi kesehatan adalah tanggung jawab pribadi sehingga bila menggunakan fasilitas kesehatan atau rumah sakit sudah sewajarnya mengeluarkan biaya pribadi. Pada prinsipnya mereka menganggap fasilitas dari negara seharusnya digunakan untuk yang benar-benar tidak mampu, sehingga mereka yang masih mampu tidak perlu ikut menikmati. Standar “kemampuan” sendiri bagi orang Sikep lebih mengikuti prinsip kesederhanaan dan seperlunya saja.

Masyarakat Sedulur Sikep pada umumnya tetap mengamati perkembangan keadaan dan situasi bangsa Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi dan masalah-masalah sosial lainnya, namun hanya mengevaluasi secara pasif karena merasa tidak dilibatkan.

Sebagian warga Sikep ikut aktif dalam masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat dan lingkungannya, misalnya dalam kasus pendirian pabrik semen yang dianggap mengancam keselamatan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Makna psikologis yang muncul dari hasil wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat Sedulur Sikep dalam studi ini adalah: (1) nilai kejujuran sebagai dasar; (2) memelihara hati dari iri dan dengki; (3) penanaman nilai-nilai langsung dari orang tua terhadap anak; (4) berpegang pada kearifan lokal; (5) proses internalisasi nilai tanpa batas waktu; (6) proses internalisasi nilai melalui contoh dan praktik nyata; (7) konsistensi individu yang menyampaikan nilai; (8) pentingnya kepemimpinan; (9) nilai yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik; (10) kesetaraan gender dalam kewajiban mendidik anak; (11) nilai menepati janji; (12) pengawasan melekat oleh hati nurani; (13) sederhana dalam hidup; (14) tidak menikmati yang bukan menjadi haknya; (15) nilai kemandirian; (16) mengutamakan kepentingan orang banyak; (17) peduli pada lingkungan hidup; (18) peduli pada masa depan generasi yang akan datang.

Nilai-nilai yang dianut masyarakat Sedulur Sikep, sebagian besar merupakan nilai-nilai dasar yang merupakan perlawanan terhadap segala hal yang berkaitan dengan korupsi, seperti kejujuran, kesederhanaan, tidak menikmati yang bukan haknya, dan menepati janji. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Sedulur Sikep perlu dijadikan contoh oleh masyarakat Indonesia secara luas untuk mendukung bangsa Indonesia agar bebas dari budaya korupsi.

Masyarakat Sedulur Sikep sendiri perlu lebih terbuka dalam pergaulan, sehingga mereka bukan hanya dapat mempelajari hal-hal yang penting yang dibutuhkan dalam kehidupan dari masyarakat luas, tetapi juga bias mengajarkan dan menularkan prinsip-prinsip luhur dari budaya mereka kepada masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Andrei, T., Teodorescu, D., Bourbonnai, R., & B.Oancea. (2009). A simultaneous equation model for estimating corruption in higher education. *Acta Oeconomica*, 59(4), 411-439.

- Aziz, M. (2012, Desember 22). Identitas Kaum Samin Pasca Kolonia. Pergulatan Negara, Agama, dan Adat dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. *Kawistara*, 2(3), pp. 225-328.
- Budiman, A., Roan, A., & Callan, V. J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in indonesia during the Suharto era. *Journal of Business Ethics*, 116, 139–149.
- Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2005). *Do attitudes towards corruption differ across cultures - Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore*. Social Science Electronic Publishing, Inc.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Crossin, C., Brown, M., & Norris, S. (2013). *Anti-Corruption in Indonesia*. London: Control Risks.
- Falah, F. (2012). Perilaku Korup di Mata Mahasiswa. *Seminar Nasional Psikologi Islami, Aplikasi Psikologi Islami dalam Pendidikan Karakter* (pp. 151-158). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISBN 978-602-96633-1-0.
- Gatti, R., Paternostro, S., & Rigolini, J. (2003). *Individual Attitudes Toward Corruption: Do Social Effects Matter?* World Bank Policy Research.
- Hanif, A. (2012, Oktober 21). *Reaktualisasi Ajaran Samin*. Retrieved Juni 12, 2014, from SuaraMerdeka.Com: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/kejawen/2012/10/21/610/Reaktualisasi-Ajaran-Samin>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (pranala permanen). *Kata Dasar: Korupsi*. Retrieved November 12, 2013, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan): <http://kbbi.web.id/korupsi>
- Kartini, R. A. (1985). *Letters of a Javanese princess*. Lanham: University Press of America.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015, Juli 31). *Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*. Retrieved September 20, 2015, from AACH Anti-Corruption Clearing House, Portal Pengetahuan Antikorupsi: <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>
- Leimeister, J. M., Knebel, U., & Krcmar, H. (2007). RFID as enabler for the boundless real-time organisation: empirical insights from Germany. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*, 4(1), 45-64.
- Lestari, I. P. (2013). Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 74-86.
- Mardikantoro, H. B. (2012, Oktober 3). Pilihan bahasa masyarakat Samin dalam ranah keluarga. *Humaniora*, 24(3).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Oxford Dictionaries. (pranala permanen). *Oxford Dictionaries*. Retrieved November 12, 2013, from Definition of Corruption in English: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/corruption>
- Rabl, T. (2011). The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85-101.
- Rosyid, M. (2013, November Senin 11). Peneliti Masyarakat Adat Samin, Moh Rosyid - Belajar Kejujuran dari Sedulur Sikep. (M. Oliez, Interviewer)

- Sanusi, H. A. (2009, July). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2).
- Setyawan, D. (2012, Juli-Desember). Sikap Apatisme Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi dan Patologi Birokrasi Menuju Pelayanan Publik Prima (Studi di Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu). *Jurnal Reformasi*, 2(2), 82-87.
- Sina, L. (2008, Januari). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), pp. 39-51.
- Sujatmiko, I. G. (2002, Januari). Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 25-30.
- Teachout, Z. (2009). The Anti-Corruption Principle. *Cornell Law Review*, 94(341), 341-414.
- Transparency International. (2016, February 1). Corruption Perceptions Index 2015. <https://www.transparency.org/cpi2015>.